

KONFIGURASI DAN TRANSFORMASI KEHIDUPAN AGAMA MENJELANG TINGGAL LANDAS PEMBANGUNAN NASIONAL DI KECAMATAN LEIHITU KABUPATEN MALUKU TENGAH PROPINSI MALUKU

Oleh : A. SHADIQ KAWU

I PENDAHULUAN

Pembangunan yang digalakan pemerintah selama ini, telah menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat, baik berupa perubahan sosial (social changes) maupun perubahan kebudayaan (cultural changes). Perubahan sosial dapat mencakup perubahan-perubahan dalam struktur sosial atau pola-pola lingkungan sosial, yang antara lain meliputi; sistem status, hubungan-hubungan dalam keluarga, sistem-sistem politik dan kekuatan, persebaran penduduk, dan sebagainya. Sedangkan perubahan kebudayaan adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang dimiliki bersama oleh para warga, atau oleh sejumlah warga masyarakat yang bersangkutan. Misalnya, menyangkut aturan-aturan atau norma-norma yang menjadi pegangan dalam kehidupan masyarakat, nilai-nilai moral dan agama, teknologi, seni dan estetika, bahasa dan sebagainya. Karena kedua bentuk perubahan ini senantiasa kait berkaitan, maka muncullah perubahan-perubahan yang mencakup kedua aspek tersebut, sosial dan budaya.

Di Indonesia, gejala perubahan tersebut ditemukan dalam setiap tahap Pembangunan Lima Tahunan. Begitu pesatnya perubahan itu berlangsung, khususnya pada Pclita VI digambarkan sebagai proses kehidupan yang penuh gejolak, perubahan karena didesak

oleh pertumbuhan penduduk, perubahan ekonomi, perkembangan teknologi, persaingan internasional dan perubahan lingkungan hidup.

Oleh karena itu kebijaksanaan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, bukan saja dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, akan tetapi akibat sampingan sebagai konsekuensinya bisa saja terjadi di tengah masyarakat. Misalnya, timbulnya suatu era depersonalisasi, yang menurunkan derajat manusia menjadi bukan lagi manusia. Akibatnya, bukan saja manusia itu berpikir secara tehnik dan eksperimental tetapi juga manusia tidak dapat/tidak mau dianggap sebagai manusia yang bertanggungjawab atas akibat dari tindakan-tindakannya sehingga di samping menjadi abad yang tidak saja hampa, juga menjadi abad yang tidak bertanggungjawab. (Astrid, 1979).

Mengantisipasi kemungkinan terjadinya "abad yang menakutkan" itu, pemerintah telah menerapkan kebijaksanaan pembangunan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang menempatkan pembangunan fisik material dan pembangunan agama secara bimbang. Konsep tiga kondisi ideal, yang meliputi kadar keimanan dan ketakwaan yang tinggi, wawasan keberagamaan yang luas dan matang, dan kerukunan kehidupan agama yang mantap

dan dinamis, merupakan sasaran ideal yang hendak dicapai dalam proses pembangunan nasional.

Makalah ini merupakan ringkasan hasil penelitian konfigurasi dan transformasi di Kecamatan Lcihitu, Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku. Penulis akan mencoba mengemukakan beberapa temuan lapangan sebagai jawaban dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mendasar yang menjadi dasar penelitian ini. Pertanyaan-pertanyaan mencakup: sejauh mana peranan KUA di Kecamatan, bagaimana institusi-institusi agama telah berubah sebagai dampak pembangunan nasional atau modernisasi, bagaimana pola-pola akulturasi dan inkulturasi agama melalui pendidikan, bentuk-bentuk dan isi dakwah serta jenis literatur agama yang masih dibaca dan dianggap perlu bagi masyarakat dewasa ini.

Deskripsi konfigurasi dan transformasi iklim aspek tersebut akan dikemukakan secara singkat dengan menekankan indikator-indikator umum di semua desa penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan dengan beberapa tahapan. Satu minggu pertama, diadakan penjajakan awal prosedur penyelesaian surat-surat administratif, terutama yang berhubungan dengan izin di lokasi. Pada tahap ini juga, tim mengadakan kunjungan ke Kantor Wilayah Departemen Agama, Sinode Kristen, dan menjumpai beberapa informan kunci yang ada di kota Ambon.

Sebelum mengadakan kunjungan resmi ke lokasi dan tinggal di lapangan, tim terlebih dahulu menggunakan waktu di Ambon untuk mematangkan persiapan penyaringan data. Diskusi kecil semua anggota

tim dan menginventarisasi hasil amatan yang diperoleh. Informasi awal yang diperoleh di kota Ambon ternyata sangat membantu semua personil tim ketika berada di desa penelitian.

Satu-satunya masalah yang dialami adalah perubahan lokasi penelitian. Rencana semula, sesuai desain dari Pimpinan Proyek, tim Ambon akan meneliti masyarakat Kristen di Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah. Karena beberapa pertimbangan dari Pemerintah Daerah (Ditsospol), akhirnya ditempatkan di Kecamatan Lcihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Dengan perubahan lokasi ini, tim harus memulai pendekatan awal lagi, terutama untuk mengenal latar belakang lokasi. Apalagi keadaan lokasi pertama di Pulau Haruku sangat kontras dengan lokasi yang diinginkan pemerintah Daerah. Kalau di Pulau Haruku sasarannya adalah masyarakat Kristen Protestan maka di Lcihitu masyarakat Kristen Protestan maka di Lcihitu masyarakatnya adalah pemeluk agama Islam yang masih terikat dengan tradisi lokal.

Penyaringan data secara efektif dimulai pada tanggal 25 Agustus 1991, selama penelitian di laksanakan para peneliti menyebar di empat desa dalam wilayah Lcihitu. Kondisi geografis dan arus transportasi yang tidak seimbang antara sarana angkutan dengan konsumen pemakai jasa menyebabkan hubungan antar peneliti terutama untuk pelaksanaan diskusi kelompok mingguan sukar dilaksanakan. Diskusi kecil hanya dapat dilaksanakan secara efektif dengan tiga orang peneliti -yang berdekatan. Namun demikian, hubungan

koordinasi tetap berlangsung dengan peneliti yang tinggal agak jauh dan terisolir dari pusat kota Kecamatan.

Sesuai ketentuan Pimpinan Proyek, desa yang ditempati adalah merupakan empat desa bertetangga yang dapat dijangkau kendaraan umum. Kriteria metodologis dengan menerapkan pola keberagaman yang rendah, tingkat pengamalan cenderung masih berbaur dengan tradisi lokal. Namun demikian, desa yang dipilih adalah basis komunitas Islam di daratan Pulau Ambon. Sesuai kesepakatan dengan pemerintah kecamatan, maka ditetapkan satu desa di pusat kecamatan, yaitu Desa Hila dan tiga desa lainnya yang berdekatan masing-masing, desa Keitetu, Hitu, dan Mamala.

II. PROFIL WILAYAH PENELITIAN

1. Lokasi

Kecamatan Leihitu terletak di daratan Pulau Ambon. Dari kota Ambon wilayah ini dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua dan roda empat. Jalan yang menghubungkan antar kota Propinsi Maluku dengan Leihitu sudah beraspal dan hubungan antara kedua daerah itu didominasi kendaraan angkutan umum yang setiap harinya menjalani trayek Ambon - Mamala dan Ambon - Hitu - Hila, seki tar setengah jam perjalanan dengan jarak 41 kilometer.

Kendaraan roda dua masih terbatas. Hal ini nampak di jalan-jalan desa. Penduduk setempat lebih suka berjalan kaki daripada menggunakan kendaraan bermotor. Di Kota Kecamatan Leihitu hanya ada beberapa sepeda motor, satu diantaranya adalah motor dinas milik Camat Leihitu.

Kecamatan ini beberapa di ujung paling

Timur Pulau Ambon yang secara administrative rmasuk dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah. Letak geografisnya membentang di sepanjang pesisir pantai dan bersebelahan dengan Pulau Seram. Sebelah Utara berbatasan Selat Seram, sebelah Barat berbatasan dengan Laut Bum, sebelah Selatan dengan Kecamatan Baquala dan sebelah Timur dengan Kecamatan Salahutu.

Luas wilayah secara keseluruhan, 258 KM bujur sangkar, pemukiman penduduk pada umumnya terletak dipesisir pantai. Daratan yang menjadi tempat pemukiman dan tanaman-tanaman subur di Kecamatan ini hanya seki tar 18 persen dari luas wilayah secara keseluruhan. Selainnya adalah tanah berbukit 35 persen, gunung-gunung 47 persen dan selebihnya merupakan pertemuan antara dachrah pesisir pantai dengan kaki bukit yang menjolok di sepanjang pinggiran laut.

Pola pemukiman penduduk terkonsentrasi di daerah pesisir pantai. Kebanyakan rumah dibangun di sepanjang jalan-jalan utama tetapi karena penambahan penduduk dalam tahun terakhir ini, perumahan itu makin mendekati perbukitan. Dataran untuk perumahan makin berkurang sehingga letak antar rumah sangat berdekatan.

Pusat desa ditandai dengan jumlah jalur jalan yang lebih banyak dibanding jalur jalan didusun-dusun. Persimpangan jalan yang memisahkan rumah-rumah penduduk dalam batas-batas tertentu. Hampir setiap desa mempunyai rumah adat yang bentuk dan ukurannya lebih besar dari rumah penduduk elite desa. Rumah adat ini sekarang berfungsi sebagai kantor desa tetapi ada

juga rumah adat yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal pejabat dcsa. Tidak semua kepala desa bisa tinggal di rumah adat. Di Hila, misalnya, rumah adat hanya bisa digunakan sebagai rumah pejabat dcsa manakala pejabat dcsa bersangkutan mempunyai hubungan darah dengan klan pendiri rumah adat tersebut. Karena yang membangun rumah adat di Hila, adalah klan Ollong, maka hanya kepala dcsa dari klan itulah yang berhak tinggal di rumah adat desa.

2. Administrasi pemerintahan

Secara administratif, Kecamatan Leihitu terdiri dari 16 desa dan 34 dusun. Kecamatan ini belum memiliki kelurahan termasuk desa di pusat kecamatan. Selain pemerintahan desa dan dusun, ada juga yang disebut petuangan, yaitu dcsa tradisional yang mempunyai sejarah tersendiri dalam proses penyebaran Islam di Pulau Ambon.

Informasi tentang asal usul daerah ini, terutama yang berhubungan dengan periodisasi pemerintahan sangat bervariasi. Salah satu sumber yang dapat dipegang, walaupun masih perlu seleksi, adalah naskah hikayat tanah Hitu, yang dialihbahasakan dan ditranskripsi oleh Manusama, seorang pendeta di Saparua.

Dalam naskah itu dicritakan bahwa sistem pemerintahan formal di wilayah Leihitu, sudah ada sebelum masuknya bangsa Portugis. Waktu itu, ada empat perdana yang memegang satu wilayah teritorial, dan sifatnya otonom. Masing-masing perdana bertanggungjawab pada satu ikatan konfederasi. perdana ini adalah (1). Sapole zaman jadi bergelar totohatu, (2) Waipalili

atau zaman mulai bergelar tanihitumesen, (3). Jamilu, bergelar lating atau nustafi, dan (4). Kiyai pati, bergelar Ollong atau pati tubang. Konfederasi empat perdana ini, diikat oleh perjanjian mufakat dengan ikrar : "itulah seperti emas tiada dengan sepuhnya lagi."

Di seluruh bagian pesisir Utara dan Timur Pulau Ambon pada waktu itu, termasuk dalam ikatan federasi ini. Sistem ini berkembang ketika wilayah perdana mereasakan perlunya memperkuat wilayah mereka dengan ikatan yang lebih ketat. Oleh karena itu, keempat perdana kemudian sepakat mengangkat seorang raja. Menurut beberapa informasi di Hila dan Hitu, Raja yang pertama diangkat pada waktu itu, adalah Latusinatia. Bersama penempatan raja, ditetapkan pula dalam struktur pemerintahan seorang hakim yang bertugas untuk menyelesaikan kasus sengketa, di wilayah empat perdana tadi. Hakim pertamanya diangkat seorang tokoh bernama Abubakar Nasidiki.

Kemudian terjadi proses perubahan wilayah perdana menjadi semacam "desa" pada tahun 1599, yaitu ketika Belanda masuk ke wilayah ini. Sebelum adanya istilah "dcsa", wilayah-wilayah tersebut masih populer dengan "negeri". Sampai sekarang, istilah negeri masih populer dan jabatan kepala dcsa masih diidentikan dengan raja.

3. Kependudukan dan mata pencaharian.

Hingga pertengahan tahun 1991, jumlah penduduk di Kecamatan Leihitu, 54.664 jiwa. Terdiri dari 10.169 kepala keluarga. Penduduk ini tersebar di 16 buah desa, masing-masing; Hila, Seith Negeri lama, Urcng, Assilulu, Larikc, Wakasih, Allang,

Liliboy, Halu, Hitu lama, Hitumeseng, Mamala, Wakal dan Morcla.

Dibanding jumlah penduduk dengan potensi sumber daya alam yang besar, diperkirakan masih banyak sumber daya yang belum dieksploitasi oleh masyarakat. Sektor perikanan misalnya, masih ditangani secara sederhana dan bersifat subsistensi, dibanding upaya-upaya baru untuk mencoba menggunakan teknologi baru dan menjadikan sektor perikanan ini sebagai mata pencaharian yang bersifat komersial. Walaupun pemukiman penduduk terkonsentrasi di pesisir pantai, sektor perikanan belum mendapat penanganan yang intensif, sehingga sektor itu masih tetap menggunakan teknologi tradisional dengan hasil tangkap yang relatif terbatas.

Penduduk Leihitu nampaknya lebih tertarik pada sektor pertanian dibanding perikanan. Seperti halnya dengan laut yang kaya dengan sumber daya alam, tanah di Leihitu juga sangat subur. Tanaman bernilai ekspor, seperti cengkeh dan pala, tumbuh subur dan dapat ditemukan dimana-mana. Tanaman rempah-rempah ini, dapat ditemukan mulai dari pesisir pantai sampai ke puncak-puncak gunung. Selain cengkeh dan pala, sagu yang menjadi makanan pokok penduduk desa juga tumbuh subur di seluruh wilayah Kecamatan.

Demikian pula hasil pertanian seperti jagung, ketelapohon, ubi jalar, kacang tanah dan buah-buahan. Masyarakat Leihitu, mempunyai tradisi gotong royong yang sangat positif untuk mendapatkan nilai ekonomi tambahan. Misalnya saja, rumah tangga yang berdekatan, akan saling bekerjasama untuk memetik cengkeh pada waktu panen. Kerjasama ini harus dilakukan ber-

gantian, karena panen cengkeh masing-masing keluarga berbeda waktunya. Dengan demikian kalau semua anggota rumah tangga yang berdekatan mempunyai kebun cengkeh, maka waktu panen harus dijadwalkan, supaya mereka secara bergiliran dapat saling membantu untuk memetik cengkeh tetangga. Kerjasama ini bukan semata-mata sekedar saling membantu tetapi diantarKelompok ini ada imbalan kerja yang akan diberikan berupa cengkeh kepada setiap orang yang terlibat dalam pemetikan itu. Pembagian upah ini, bersifat longgar dan tidak ada pedomannya. Jumlah imbalan jasa dari seorang pemilik cengkeh kepada pemetiknya, tergantung pada kemauan pemiliknya. Tetapi, ada kecenderungan, bahwa anggota keluarga yang ikut dalam panen, akan mendapat bagian yang lebih besar dibanding dengan pemetik lainnya yang bukan anggota keluarga. Demikian pula, bagian tetangga terdekat biasanya akan lebih banyak dibanding dengan tetangga yang letak rumahnya lebih jauh dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan pemilik cengkeh.

Pola kegiatan ekonomi masyarakat ditentukan berdasarkan potensi sumber daya. Pemasaran cengkeh, pala dan hasil pertanian lainnya, terutama yang diproduksi dalam jumlah besar disalurkan melalui KUD. Pengelompokan petani dalam KUD merupakan kerjasama yang menguntungkan para petani. Dengan cara ini juga, petani dapat menghindari dari jebakan para rentenir yang mencari keuntungan sepihak tanpa memperhitungkan kerugian petani.

Selain bekerja sebagai nelayan dan petani, ada juga penduduk Leihitu yang bekerja sebagai pegawai negeri, pengrajin dan

mata pencaharian lainnya, seperti pengusaha dan sopir angkutan umum, wiraswasta, tetapi persentase dari kelompok ini sedikit dibanding dengan jumlah yang menckuni pekerjaan sebagai petani dan nelayan.

4. Penggolongan dan pelapisan sosial

Pelapisan sosial di Kecamatan Leihitu, tidak secara baku dan eksplisit terungkap dalam sistem sosial masyarakat, khususnya pelapisan berdasarkan keturunan. Tingkat sosial melingkar pada fungsi dan peran yang dimainkan oleh seseorang seperti Raja, para pemuka adat, kepala-kepala desa dan sebagainya, pada level atas, dan dibawahnya adalah rakyat.

Istilah bangsawan dikaitkan dengan tradisi rekrutmen pemimpin desa dari keturunan tertentu semata-mata berdasarkan jenis "darah" sebagaimana tradisi kepemimpinan pada beberapa klan di Kecamatan Leihitu. Pelapisan sosial mulai bergeser dari "peran bangsawan" ke akumulasi peran dan kharisma. Dewasa ini, strata hamba atau kelompok lapis bawah dalam pelapisan sosial sudah tidak dikenal lagi dalam masyarakat. Strata itu kini digantikan dengan "rakyat", tetapi peran dan fungsinya jauh lebih tinggi daripada "hamba" dalam stratifikasi tradisional.

III. TEMUAN HASIL PENELITIAN

1. Pendidikan agama

Lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan agama di Leihitu, adalah Tarrikan Kanak-kanak, SDN, SLTPN dan SLTAN. Selain itu, ada sebuah pesantren yang berlokasi di Desa Hila, yang dikelola Yayasan Jembatan Jasa Ambon.

Sebuah madrasah setingkat Ibtidaiyah di Desa Hila juga pernah berfungsi padazaman pendidikan Jepang. Madrasah ini didirikan oleh tiga orang mubaligh, yaitu : Ahmad Bahsoan, Ahmad Hatala, dan Ahmad Hui. Madrasah ini bisa bertahan selama enam tahun dan dalam kurikulumnya menerapkan seratus persen materi pendidikan agama. Waktu belajar pada sore hari. Hal ini maksudnya agar murid-murid sekolah dasar yang belajar di waktu pagi dapat mengikuti pelajaran agama di waktu sore pada madrasah ini. Sayang sekali, usia madrasah ini berakhir setelah ketiga pendirinya meninggalkan Hila.

Dalam pendidikan formal, khususnya di SDN dan SMPN, penyajian mata pelajaran agama sangat rendah. Di SMP Hila-Keitutu saja, penyajian mata pelajaran agama sangat rendah. Di SMP Hila-Keitutu saja, penyajian mata pelajaran agama mendapat porsi dua jam pelajaran per minggu, demikian pula di SDN, kecuali untuk kelas 4,5 dan 6 masing-masing mendapat porsi 3 kali seminggu. Dibanding mata pelajaran lainnya, porsi mata pelajaran agama dinilai tidak cukup, sehingga perlu dipertimbangkan frekwensi penyajiannya atau bobot satuannya yang seimbang kedudukannya sebagai mata pelajaran urutan pertama, dalam pemberian prestasi murid lewat buku rapor. Di pihak lain amat terasa, semakin beratnya tantangan moral murid-murid dewasa ini. Khusus di SMPN, pengembangan wawasan keagamaan siswa dinilai kurang mampu distimulasi tanpa melakukan metode-metode diskusi, sebagaimana tertuang dalam buku pedoman pengawasan penilaian dan pembinaan kependidikan yang dikeluarkan Kanwil Dikbud Propinsi Maluku (1991).

Pelaksanaan pendidikan agama di sekolah bukan saja tergugat dari sudut kelayakan proporsi jam pelajaran akan tetapi juga dari faktor lain. Di Keitetu, sejak tahun 1980/1981 tidak ada guru agama pemerintah di SDN, sementara di Hila, Hitu dan Mamala, ada satu dua guru agama, dengan frekwensi jam pelajaran dan jumlah kelas yang tidak berimbang. Di sekolah yang tidak mempunyai guru agama, materi pelajaran agama terpaksa dibawakan oleh guru kelas untuk mengantisipasi kepincangan tersebut. Hal ini menyebabkan adanya ketidaktepatan dari, segi kurikuler, juga dari segi metodologis. Guru kelas lebih banyak menggunakan ceramah yang terfokus pada pembinaan anak, sesuatu yang dianggap paling enteng, dilihat dari kapasitas guru kelas, tanpa harus membuat satu an pelajaran. Selain itu pokok bahasan juga berputar pada bidang ibadah praktis seperti sholat.

Di sekolah menengah, baik tingkat pertama (SLTP) dan SLTA proses belajar mengajar bidang study agama sedikit lebih baik. Penyajian materi pelajaran berlangsung sesuai waktu yang telah dialokasikan. Ditambah lagi dengan kegiatan co-kurikuler seperti praktek sholat, menulis dan menghafal ayat-ayat dan doa-doa tertentu, serta membentuk kelompok kasidahan. Evaluasi dilakukan melalui tahap formatif (setiap selesai penyajian materi) dalam bentuk lisan dan tulisan, sub sumatif (setiap 2-3 kali pertemuan) dan sumatif (bulan).

Pendidikan agama non pemerintah yang dikelola oleh masyarakat, yaitu madrasah dan pesantren. Di dua desa bertetangga seperti Hila-Keitetu, pendidikan jenis madrasah ini, sudah dikenal. Selain trio

mubalig yang mendirikan madrasah di Hila pada zaman pendudukan Jepang, ada juga sebuah madrasah yang dibangun masyarakat atas prakarsa KH Muhammad Nur. Madrasah mulai berfungsi pada 1927 dan 1953. Sekalipun kurun waktu itu kegiatan madrasah ini pernah terputus, karena pengasuhnya KH Muhammad Nur meninggalkan Hila, dan berangkat ke Balikpapan untuk menambah pengetahuan agama.

Peranan KH Muhammad Nur, bukan saja populer dai Keitetu, tetapi, figur ini adalah profil seorang ulama serba bisa yang pernah dimiliki seluruh jazirah Hitu (Kecamatan Leihitu). Ia memiliki wawasan keilmuan yang luas, bukan saja ilmu agama Islam (Nahwu, shorof, hadis, tafsir, dan fiqh), seperti juga ilmu-ilmu lain, yang cenderung dikategorikan sebagai pengetahuan umum, misalnya ilmu mantiq, falaq, dan acuhd. Beliau juga menjadi rukun berbagai masalah yang berkaitan dengan masalah duniya bagi masyarakat di Kecamatan Leihitu.

Pendidikan pesantren, terdapat di Kota Kecamatan. Pesantren Darul Argam, dikelola oleh Yayasan Jembatan Jasa yang pusat aktivitas pengurusnya ada di Ambon. Pesantren ini mengelola tiga tingkat pendidikan formal, yaitu, Raudhatul Atfal (Taman kanak-kanak), Madrasah Ibtidaiyah (selingkat SD), dan Madrasah Tsanawiyah (setingkat SMP). Di tingkat Tsanawiyah, buku-buku pedoman yang dipergunakan bervariasi menurut bidang study. Umumnya, kurikulum pesantren terfokus pada mata pelajaran agama, dan tidak memberikan materi pelajaran yang bersifat umum. Pada

mulanya, pengasuh Pesantren Darul Argam, mewajibkan pemakaian bahasa Arab dalam proses belajar mengajar, tetapi akhirnya ini, pihak guru pesantren sudah diizinkan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar selain bahasa Arab. Namun izin itu masih berstatus "pelengkap", karena pemakaian bahasa Arab masih tetap diwajibkan.

Selain madrasah dan pesantren, masyarakat juga menyelenggarakan pengajaran-pengajaran lokal. Pengajaran anak-anak dikelola anggota masyarakat secara pribadi. Dan pengajaran dalam bentuk majlis taklim, pengkajian agama, tahlilan dan acara barzanji, tersebar di semua desa penelitian, sebagai spesifikasi desa-desa di Leihitu. Karakteristik pengajaran ditandai tidak adanya kurikulum yang baku, jumlah murid tidak tetap dan waktu pelaksanaannya disesuaikan keadaan serta persyarafan administrasi tidak mengikat. Kondisi tersebut disebabkan oleh sifat kegiatan itu yang sebenarnya tidak lain dari pengajaran dasar Al-Qur'an yang diperluas. Selain diberikan pelajaran dasar Al-Qur'an, peserta didik juga diberikan pengetahuan tentang tatacara taharah dan sholat serta doa-doa. Komposisi dan pengaturan pelajarannya tergantung pada selera seorang guru. Tujuan utamanya, agar peserta didik memiliki pengetahuan praktis tentang bidang-bidang tersebut. Pada umumnya, guru mengaji menggunakan metode tradisional model bagdady, dimana pertama-tama peserta diajarkan mengenal huruf hijaiyah. Proses itu diulang-ulang, hingga mencukupi waktu sampai enam bulan, bahkan satu tahun.

Kegiatan yang dapat mencukupi mosi kegamaan dan meningkatkan kemampuan

membaca adalah perkumpulan berzanji. Perkumpulan ini merupakan tradisi khususnya bagi kaum wanita baik melalui wadah PKK maupun melalui kelompok yang khusus dibentuk untuk itu. Kegiatan membaca berzanji dilakukan satu sampai 3 kali dalam seminggu, bergilir dari rumah ke rumah anggota. Banyak remaja putri yang bergabung karena selain dapat memperluas kemampuan membaca tulisan Arab juga mengandung unsur seni dengan irama kasidahan khas lokal. Mated yang dibaca dan dilagukan, adalah berzanji itu sendiri Syarful anam, dan Dibag. Ketiganya terkandung dalam berzanji dalam berzanji itu sendiri.

2. Dakwah Agama di Masyarakat

Kecamatan Leihitu dengan empat desa penelitian pada hakekatnya adalah, merupakan konfigurasi dari pola kehidupan tradisional dalam beragama. Salah satu indikatornya adalah tidak adanya organisasi dakwah yang khusus menangani kedakwaan secara programatis dan sistematik. Di kota kecamatan memang ada organisasi MDI (Majlis Dakwah Islamiyah) tetapi organisasi ini tidak fungsional, cenderung bersifat formalistik, dan sering digunakan untuk melegitimasi status pengurusnya dalam strata sosial yang baru.

Untuk mengetahui bagaimana kegiatan dakwah berlangsung dapat dikemukakan beberapa bentuk kegiatan dakwah yang umum berlangsung di desa-desa penelitian.

a. Khutbah Jum'at.

Khutbah Jum'at dipandang sebagai bagian dari sholat Jum'at itu sendiri, sehingga harus dilakukan sesuai ketentuan

yang mampu. Ada juga sesajen yang turut dihidangkan tetapi tidak boleh dimakan, karena diperuntukkan bagi arwah almarhum. Dalam acara hari ketujuh, diadakan tahlilan dan khataman Al-Qur'an.

- c. Mattampung (pemasangan batu nisan). Pada hari keempatpuluh setelah meninggal, keluarga mengadakan upacara dengan mengundang seluruh keluarga dan tetangga serta sahabat. Pada acara ini dilakukan tahlilan dan sesudah tahlilan, pihak keluarga datang ke kubur untuk menanam batu nisan. Diantara acara yang berkaitan dengan kematian, mattampung adalah upacara yang paling ramai dilaksanakan oleh keluarga. Upacara lainnya adalah peringatan hari keseratus dan acara haul (Bugis : maltemmu taun) pada waktu cukup satu tahun meninggalnya Almarhum. Semua acara yang dilakukan untuk kematian, imam desa atau imam dusun serta perangkat syara' memegang peranan, karena tujuannya adalah mendoakan almarhum.

HI

Pembauran antara kepercayaan lokal yang bersifat tradisional dengan ajaran Islam masih mewarnai nilai-nilai yang dianul

masyarakat Desa AllamungengpatuE Kabupaten Bone, yang pada umumnya menganut Agama Islam.

Aspek-aspek keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat, adalah menjalin hubungan dengan Allah Tuhan Pencipta dalam bentuk ibadah serta pelaksanaan upacara-upacara daur hidup, upacara tolak bala dan upacara keagamaan.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat masih terikat sistem norma dan adat yang masih diindahkan dan dipatuhi, dan dalam kehidupan beragama, mereka menggantungkan diri pada tokoh agama dan pemimpin mereka.

Saran-Saran :

Dalam masyarakat Desa Allamungeng PatuE Kab. Bone masih banyak ditemukan nilai-nilai dan tradisi yang menjadi kebudayaan yang dapat dikembangkan dalam rangka membentuk manusia yang utuh, sehingga kondisi kultural masyarakat akan lebih bennakna sebagai potensi pembangunan.

Upacara-upacara tradisional hendaknya diwamai dengan ajaran Islam, untuk itu perlu adanya bimbingan dakwah yang mampu mengajak masyarakat untuk bertindak lebih rasional. Maka partisipasi aktif pemuka agama dibutuhkan untuk melestarikan kebudayaan disertai peningkatan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

dengan pembacaan Al-Qur'an dan tahlilan. Selain itu upacara yang sama juga dilakukan pada saat-saat hajatan, dan setiap malam Jum'at di rumah seseorang yang sedang menunaikan ibadah haji.

Berkas-berkas mapannya proses dakwah masa lampau juga terlihat dalam bidang kesenian yang diwarnai oleh nafas Islam seperti tari gambus pada acara khitanan, perkawinan, tari sawat untuk penjemputan tamu dan yang paling populer adalah hadrat dilakukan sepanjang bulan puasa, sesudah sholat tarwih sampai makan sahur keliling kampung, dan mengiringi upacara arakan hewan kurban pada musim haji. Hal-hal yang tertinggal dari masa lampau yang dari segi dakwah masih dapat diharapkan andilnya dalam pemupukan tradisi simbol keagamaan dan sampai dimana mampu bertahan berhadapan dengan perkembangan kesenian sekarang terutama band dan orkes, masih perlu dilihat transformasi dan dialektikanya.

3. Lektur Agama

Sulit diharapkan adanya lektur keagamaan yang mengisi rumah-rumah penduduk, demikian pula kecenderungan belajar agama dan pusat-pusat pelajaran agama sangat minim, bahkan tidak ada di desa itu.

Lektur yang paling populer adalah berzanji disamping Al-Qur'an. Lebih dari kandungannya yang memuat kisah Nabi. Berzanji memikul beban nilai yang cukup berat karena hampir segala aktivitas dan saat kritis yang dialami penduduk desa baik sebagai pribadi maupun kolektif selalu dikaitkan keberkatannya lewat pembacaan berzanji. Sedang Al-Qur'an sebagai Kitab

Suci, dibaca pada waktu tertentu (malam Jum'at) mengiringi peristiwa kematian dan dalam bulan ramadhan, khususnya surah-surah tertentu, seperti Yasin yang dianggap mengandung khasiat tertentu.

Legitimasi historis itu merupakan simbol keterikatan masyarakat Leihitu terhadap lektur Al-Qur'an dan Berzanji, yang secara tradisional dipertahankan. Demikian juga dengan kitab-kitab klasik yang lain disimpan dan cenderung diistimewakan kedudukannya, seperti Kitab Al Idha fil Figh, milik KH Muhammad Nur di Keitutu. Buku ini bertulisan tangan dengan tinta hitam dan terbungkus dengan kain bersama beberapa gulungan naskah khutbah dalam potongan bambu.

Konsentrasi pelaksanaan tugas keagamaan pada diri Imam dan aparatnya merupakan salah satu faktor kurang tertariknya masyarakat mempelajari agama secara pribadi dari lektur-lektur populer. Buku yang ditemui di seluruh desa penelitian, hanya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas praktis. Namun demikian, ada beberapa lektur yang ditemukan di rumah aparat masjid, seperti: Kumpulan khutbah Jum'at oleh Drs. Syaminan Zaini, 1981, Pedoman Khutbah Jum'at Dari Masa ke Masa oleh Ustaz Mahfudli Sahli, Khutbah Jum'at oleh Yunan Nasution, Kumpulan Khutbah Jum'at Pilihan, 1981, Khutbah Jum'at Satu Tahun mengisi Aqidah Islam oleh K. Amin. Kumpulan Khutbah Jum'at oleh Bey Arifin. Selain itu ada buku saduran, seperti Kitab Furkunan karangan H. Abd. Rasyid Banjar disadur dari buku Syekh Muhammad Arsyad Banjar. Ratib Hadad, buku yang berisi zikir dan doa dinukilkan dari Sayyid Abdul-

lah bin Abibakar bin Husain Assegaf, Ambon.

"Kitab Suci Al-Qur'an dalam berbagai bentuk cetakan, seperti yang diterbitkan Al Maarif Bandung, Al-Qur'ah dan terjemahannya, terbitan Departemen Agama, dan Surah Yasin ukuran saku. Al-Qur'an ini selalu didapati di rumah-rumah penduduk dan di masjid-masjid.

4. Organisasi keagamaan

Salah satu organisasi keagamaan, yang merupakan warisan dari zaman kerajaan di Leihtu, adalah organisasi kepenghuluhan. Struktur organisasi ini, terdiri dari Imam (satu orang), khatib (dua sampai tiga orang), modin (dua sampai tiga orang), dan marbut (satu orang). Imam bertugas sebagai imam pada setiap sholat jamaah, khatib untuk membacakhutbah, modim sebagai muazzin, dan marbut, mengurus kebersihan dan keamanan masjid. Penghulu bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan peribadatan di dalam masjid, sedangkan kegiatan yang berkaitan dengan rehabilitasi atau pembangunan masjid merupakan tanggungjawab raja dan adat. Kepanitiaan dalam pengelolaan masjid sebagaimana didapati di tempat lain, tidak dikenal di wilayah ini.

Untuk menelusuri proses transformasi pola kepemimpinan dan keumatan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari variabel-variabel yang telah mempengaruhi proses perubahan tersebut. Seperti diketahui, bahwa proses perubahan secara makro di wilayah ini, paling tidak disebabkan dua hal. Pertama, faktor dari dalam, yaitu berubahnya (bergesernya) komitmen masya-

rakat terhadap lembaga dan organisasi yang ada (organisasi penghulu dan organisasi masjid tradisional). Kedua, adanya faktor dari luar, yaitu terjadinya pergeseran sikap dan persepsi masyarakat terhadap organisasi agama yang dibangun sebelumnya. Faktor pertama, bergesernya komitmen terhadap lembaga-lembaga keagamaan tradisional, seperti peranan organisasi adat (uhusallua). Organisasi ini, sebenarnya lepas dari struktur organisasi penghulu. Karena, mempunyai tanggung jawab sepenuhnya untuk mengawasi dan menjaga masjid. Pada saat ini kelompok tersebut mulai diintegrasikan ke dalam organisasi penghulu, namun jangkauannya sudah mulai bergeser dari hanya untuk tugas-tugas kemasjidan, menjadi tugas agama dalam skala yang lebih besar. Keterikatan kepada masjid, menjadi simbolik dan oleh karena itu masjid adalah ungkapan simbolik untuk menggambarkan agama secara makro.

Namun demikian, organisasi ini tidak berkembang sebagaimana mestinya. Meskipun sudah bisa diakomodasi melalui pengembangan fungsi-fungsi keagamaan yang lebih besar, tetapi penangkatan personil baru yang bertolak dari pertimbangan geneologis dan bukan pertimbangan keahlian menyebabkan organisasi ini tidak dapat berkembang sebagaimana mestinya.

Indikator semakin tajamnya pemisahan jamaah pria dan wanita, juga menunjukkan bahwa organisasi agama lokal sudah tidak mampu lagi mengatasi perpecahan-perpecahan yang terjadi di kalangan umat, dan semakin rapuhnya faktor-faktor integratif yang pernah dominan di seluruh jazirah Hitu.

Walaupun ada organisasi lain, seperti PHBI dan institusi KUA sebagai ujung tombak Depag di kecamatan, organisasi ini secara struktural tidak mempunyai massa. Ada kecenderungan masyarakat menganggap bahwa organisasi tersebut sebagai media pemerintah dibanding sebagai forum inventarisasi keinginan-keinginan dari masyarakat bawah. Majelis Dakwah Islamiyah juga kurang populer, karena orientasinya dianggap terlalu vokal dalam masalah-masalah politik.

Pada dasarnya, masyarakat Leihitu membutuhkan organisasi independen yang dapat menjembatani aspirasi keagamaan masyarakat dengan kebijaksanaan pemerintah. Demikian pula kepemimpinan yang dibutuhkan bukan masalah formal atau tidaknya akan tetapi bagaimana semua kebutuhan masyarakat termasuk penyuluhan keagamaan yang relatif terbatas bisa terpenuhi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan utama yang merupakan hasil penelitian, yaitu terjadinya transformasi pada sektor kehidupan keagamaan, disebabkan perkembangan masyarakat dalam beberapa dekade. Faktor-faktor penyebabnya antara lain karena wilayah Leihitu secara geografis di daerah sepanjang pesisir pantai telah lama mengadakan kontak secara intensif dengan bangsa-bangsa lain (Portugis, Belanda, maupun dengan bangsa-bangsa lain (Portugis, Belanda), maupun dengan pendatang yang berasal dari komunitas budaya yang lain.

Kontak dengan pendatang barat, di mulai sejak abad yang sangat lama ketika negeri-negeri di Pulau-pulau ini, dengan kekayaan dan sumber alam potensial, didatangi pe-

dagang barat yang mengeruk keuntungan dari hasil rempah-rempah di daerah ini. Karena itu pula, hampir sepanjang abad negeri-negeri ini terjebak dalam konflik yang panjang dan keras, serta meminta banyak korban. Kedatangan bangsa-bangsa barat dengan politik "pecah belah" meretakkan ikatan tradisional, seperti pela yang pernah mantap.

Persepsi masyarakat terhadap agama, selalu berada dalam pusaran agama kontekstual, bercampur dengan tradisi. Umat Islam selalu berjuang melawan penjajah. Mereka berada dalam kondisi-kondisi yang mengharuskan untuk memupuk kekuatan dengan cara apa saja. Termasuk, meramu kembali kepercayaan agama dalam ikatan-ikatan tradisional yang sarat dengan mistik. Usaha mengembalikan masyarakat kepada kepercayaan teks, masih menghadapi banyak masalah karena sistem pemahaman terhadap agama kontekstual tadi sudah berjalan mapan. Dalam hal ini, mudah muncul kelompok-kelompok agama lokal yang berusaha memapankan eksistensi kelompoknya dengan mensistimatisasikan kegiatan-kegiatannya, kelompok berzanji tahlilan, adalah salah satu contoh dari kasus ini.

Sebagai saran, sebaiknya pranata tradisional dapat dikembangkan dan diakomodasi dengan struktur organisasi yang lebih rasional dan programatis. Usaha kearah ini hanya akan tercapai manakala ada kerjasama antara pemuka adat, agama dan pemerintah desa, sebagai pewaris dari struktur lama. Demikian pula, penambahan jumlah personil Depag di Kecamatan dan kalau memungkinkan bisa di bentuk Kantor Perwakilan KUA di daerah-daerah terpencil yang terisolasi dari pusat Kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kuntjaraningrat, Masyarakat Desa di Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta. 1962
- Paeni, Muchlis, ed, Teknologi dan kehidupan sosial di Kawasan Pantai, P3MP Universitas Hasanuddin, Ujungpandang.
- Wayner, Myron, ed, Modernisasi, Dinamika Pertumbuhan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. 1977
- Shadiq Kawu, dkk, Konfigurasi dan Transformasi Kehidupan Agama menjelang tinggal landas pembangunan nasional di Kecamatan Sentani, Irian Jaya Badan Litbang Agama. 1991
- Cooley, I Frank, Mimbar dan Tahta, hubungan lembaga-lembaga keagamaan dan pemerintahan di Maluku Tengah, Sinar Harapan, Jakarta. 1987
- Syafii, Ahmad, ed, Konfigurasi dan Transformasi kehidupan Agama di Indonesia, Tahap I, Badan Litbang Agama. Jakarta. 1991